AdministrativA
Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik
Volume 7 (1) 2025 97-105 E-ISSN: 2714-7673
administrativa.fisip.unila.ac.id

ARTICLE

Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung: Tantangan dan Peluang

Muhammad Alif Listiansyah[1*], Susana Indriyati Caturiani[2], dan Dewie Brima Atika[3]

[1,2,3]Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri. Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Listiansyah, M.A., Caturiani, S.I., Atika, D.B., (2025) Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung: Tantangan dan Peluang. Administrativa 7 (1)

Article History
Received: 14 Oktober 2024
Accepted: 6 Januari 2025

Keywords:
Program Implementation
Reproductive Health Program
Adolescent Reproductive Health

ABSTRACT

Adolescent reproductive health is a health condition that concerns reproductive organ health issues whose readiness begins in adolescence. With the changes when entering adolescence, there needs to be supervision and guidance carried out by all levels, starting from the family at home and at school in order to protect teenagers from deviant behavior (free sex) and early marriage. The adolescent reproductive health program has been implemented in all districts/cities in Lampung Province. However, the number of cases of early marriage in Lampung Province can still be said to be high. Therefore, the adolescent reproductive health program is considered to be still not optimal in its implementation. This research aims to analyze the implementation of adolescent reproductive health programs in high schools in Lampung Province and identify supporting factors and obstacles faced in the process of implementing adolescent reproductive health programs in schools in the Districts/Cities of Lampung Province. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results of research using Jones (1996) program implementation model including organization, interpretation and implementation show that the implementation of adolescent reproductive health programs in high schools in Lampung Province is still not optimal. Some of the obstacles faced are poor coordination between agencies, different student understanding and the absence of follow-up activities.

Kata Kunci:
Implementasi Program
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Kesehatan Reproduksi Remaja

ABSTRAK

Kesehatan reproduksi remaja merupakan kondisi kesehatan yang menyangkut masalah kesehatan organ reproduksi yang kesiapannya dimulai sejak usia remaja. Dengan adanya perubahan pada saat memasuki masa remaja, perlu adanya pengawasan serta pembinaan yang dilakukan oleh seluruh lapisan mulai dari keluarga di rumah maupun sekolah guna menjaga remaja dari perilaku menyimpang (seks bebas) serta pernikahan dini. Program kesehatan reproduksi remaja telah dilaksanakan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. Akan tetapi, angka kasus pernikahan dini di Provinsi Lampung masih dapat dikatakan tinggi. Oleh karena itu program kesehatan reproduksi remaja dinilai

* Corresponding Author
Email : aliflistiansyah08@gmail.com

© 2025 Author(s), Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik

masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program kesehatan reproduksi remaja pada sekolah menengah atas di Provinsi Lampung dan mengidentifikasi faktor pendukung serta kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja di sekolah pada Kabupaten/Kota Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menggunakan model implementasi program milik Jones (1996) meliputi pengorganisasian, interpretasi dan penerapan menunjukkan bahwa implementasi program kesehatan reproduksi remaja pada sekolah menengah atas di Provinsi Lampung masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi yaitu koordinasi antar instansi yang belum baik, pemahaman siswa yang berbeda serta belum adanya kegiatan lanjutan.

A. PENDAHULUAN

Masa remaja merupakan masa peralihan yang signifikan dengan mulai terjadinya perkembangan baik fisik, psikologis, maupun intelektual. Pada umumnya remaja memiliki rasa ingin tahu yang tinggi (*high curiousity*) karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Para remaja cenderung memiliki keingintahuan untuk mencoba sesuatu yang belum pernah mereka alami. Perlu adanya pengawasan serta pembinaan secara integral dengan pembinaan yang dilakukan oleh seluruh lapisan mulai dari keluarga di rumah, di sekolah, hingga di lingkungan masyarakat.

Dinyatakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang salah satunya mengatur tentang pelayanan kesehatan reproduksi remaja dengan memberikan bekal pengetahuan kepada remaja mengenai anatomi dan fisiologi reproduksi dan berbagai permasalahan reproduksi seperti kehamilan dan HIV/AIDS serta mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko atau kejadian tidak diinginkan dan mempersiapkan remaja untuk menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMEN PPA) melalui peraturan pemerintah yang ada lalu dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak yang ada di Provinsi Lampung termasuk terkait permasalahan kesehatan anak.

Pada saat ini seks bebas menjadi salah satu masalah yang melanda remaja di Indonesia. Hal ini terjadi karena pergaulan bebas, pengaruh media, keadaan lingkungan masyarakat, tidak berpegang teguh pada agama dan kurangnya perhatian orang tua. Hal ini juga disebabkan remaja mudah terpengaruh dalam perilaku seks bebas karena mengalami emosi yang kurang stabil sehingga perilaku tersebut perlu diberikan pendidikan kesehatan akibat dari perubahan masa transisi kehidupan yaitu perilaku seks bebas (Damayanti, 2019). Banyaknya kasus mengenai seks bebas yang dilakukan oleh remaja disebabkan oleh berbagai alasan, salah satu penyebab hal tersebut terjadi adalah kurangnya informasi serta salahnya pemahaman tentang seksualitas di kalangan remaja.

Tingginya tingkat pernikahan dini di Provinsi Lampung juga layak mendapat perhatian dari pemerintah daerah hal itu dikarenakan permasalahan tersebut tidak baik untuk kesehatan reproduksi bagi kedua belah pihak. Menurut Setiyaningrum (2015) kematangan psikologis belum tercapai sehingga berpengaruh terhadap pola asuh anak dinyatakan menyatakan bahwa anaknya nanti tidak mendapatkan kasih sayang yang maksimal karena anaknya diurus oleh orang tua dari pasangan usia muda. Ditinjau dari segi sosial dengan perkawinan mengurangi

kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta menjadi sebuah stigma buruk bagi keluarga di lingkungan masyarakat setempat. Jika dilihat dari segi ekonomi, perkawinan di bawah umur terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu sehingga akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (Sriharyati, 2012).

Di sisi lain masih banyak yang beranggapan bahwa materi kesehatan reproduksi selama ini telah masuk dalam mata pelajaran. Memang, beberapa unsur kesehatan reproduksi sudah ada di dalam beberapa mata pelajaran, tetapi pada dasarnya materi tersebut masih kurang bobotnya dan kurang terintegrasi. Hal ini yang menyebabkan permasalahan-permasalahan remaja terkait dengan kesehatan reproduksi tidak mendapat solusi yang tepat. Maka dari itu diperlukannya suatu metode dalam memberikan pemahaman terkait kesehatan reproduksi remaja.

Penyampaian kesehatan reroduksi remaja secara langsung melalui metode ceramah pada sekolah-sekolah menengah atas dapat dinilai menjadi salah satu alternatif yang dapat menjangkau remaja-remaja dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut masyarakat atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik, dan pengetahuan tersebut diharapkan dapat berpengaruh terhadap perilakunya serta memberikan dampak yang positif kepada msyarakat di sekitarnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan

Kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program, aktivitas atau tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Heglo dalam Abidin (2012) mendefinisikan kebijakan sebagai *a course of action intended to accomplish some end*, atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Eyestone dalam Hayat (2018) mengemukakan bahwa kebijakan adalah *the relationship of government unit to its environment* (hubungan pemerintah dengan unit-unit dalam lingkungan pemerintahan). Hubungan antar unit-unit dalam lembaga pemerintahan adalah sebagai bentuk dari kebijakan yang bersumber secara *top-down*. Setiap atasan mempunyai kebijakan yang harus dilaksanakan oleh bawahan baik secara kelembagaan maupun personal. Kebijakan itu berbentuk korelasi antar unsur dan lembaga.

Berdasarkan pendapat tersebut, kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam bidang-bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sehingga untuk efektivitas kebijakan publik diperlukan kegiatan sosialisasi, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian dari kebijakan publik, dapat dipahami bahwa kebijakan publik adalah serangkaian program, aktivitas atau tindakan dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan usulan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Konsep Implementasi

Implementasi prinsipnya merupakan suatu cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat dapat mencapai tujuannya. Webster dalam Widodo (2001) menjelaskan secara singkat bahwa implementasi kebijakan adalah menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan sehingga dapat menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu tertentu. Berdasarkan analisa kebijakan menurut Dye dan Jones (1971) mengatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan suatu kegiatan setelah disahkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang terorganisir dari agen-agen eksekutif.

Berhasil atau tidaknya suatu program diimplementasikan tergantung dari unsur pelaksanaannya (eksekutif) unsur pelaksanaan ini merupakan unsur ketiga, pelaksanaan penting artinya karena pelaksanaan baik itu organisasi maupun perorangan bertanggung jawab dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. Guna mencapai tujuan implementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan aksi atau tindakan yang berupa penghimpunan sumber dana dan pengelolaan sumber daya alam dan manusia. Hasil yang diperoleh dari aksi pertama dapat disebut input kebijakan, sementara aksi yang kedua disebut sebagai proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005). Saat mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.

Program di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones (1996) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Jones (1996) mengemukakan implementasi program sebagai *implementation is the set of activities directed toward putting a program into effect* yang berarti bahwa implementasi merupakan serangkaian aktivitas atau kegiatan, untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu. Implementasi program terdiri dari tiga pilar utama yang sangat penting yaitu *organization, interpretation, and application*. Tiga kegiatan berikut ini adalah pilar-pilarnya: 1. Pengorganisasian: Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. 2. Interpretasi: Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. 3. Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Konsep Program

Kebijakan public dan program merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik. Program merupakan kumpulan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dapat menjadi dasar bagi suatu program. Program kesehatan reproduksi remaja merupakan upaya pemerintah guna mewujudkan keluarga yang berkualitas dengan peningkatan pengetahuan, perilaku remaja 30 dan kesadaran sikap para remaja peduli dan bertanggung jawab dalam kehidupan yang mereka jalani. Kesehatan reproduksi remaja merupakan suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Remaja perlu mengetahui kesehatan reproduksi remaja agar memiliki informasi yang benar mengenai proses reproduksi, melalui informasi yang benar diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi.

Remaja Sekolah Menengah Atas (SMA) yang notabenenya adalah remaja yang akan menjadi pekerja produktif di Indonesia dengan upaya meningkatkan kemampuan para siswa, guru serta masyarakat di lingkungan sekolah sehingga dapat memelihara kesehatan pribadi, kesehatan lingkungan sekitar dan terciptanya lingkungan sekolah yang sehat bagi para

siswanya. Menggunakan berbagai metode seperti pemberian informasi, pelatihan dan pembinaan dengan beragam topik dan mediapembelajaran sehingga memudahkan parasiswa untuk memahami konteks kesehatan reproduksi remaja.

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai program reproduksi remaja pada sekolah, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan mempelajari kesehatan reproduksi remaja yaitu agar para remaja sadar terkait pentingnya kesehatan reproduksi sehingga para remaja dapat menentukan peran mereka dalam menciptakan keluargayang berkualitas secara fisik, mental, finansial, dan lingkungan sosial masyarakat.

C. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun fokus penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu model-model implementasi kebijakan milik Jones (1996), yaitu pengorganisasian, interpretasi dan penerapan. Peneliti mengambil lokasi penelitian dalam lingkup wilayah Provinsi Lampung dan dilakukan pada unit lokasi penelitian, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan SMAN 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu (1) Observasi, (2) Wawancara, dan (3) Dokumentasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Kesehatan Reproduksi Remaja pada Sekolah Menengah Atas Provinsi Lampung di SMAN 1 Kota Gajah

SMAN 1 Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu sekolah dari banyak sekolah yang ada pada Kabupaten Lampung Tengah. SMAN 1 Kota Gajah sangat aktif dalam mendukung segala kegiatan siswa/i yang ada. Sudah cukup banyak prestasi yang telah ditorehkan oleh SMAN 1 Kota Gajah baik itu tingkat Kabupaten, Provinsi maupun nasional. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung memiliki kegiatan atau program kesehatan reproduksi remaja dengan sasaran yaitu pada sekolah-sekolah menengah atas. Hal itu diperuntukkan untuk memberikan edukasi untuk menjaga organ reproduksi serta pemahaman tentang bahaya dari seks bebas serta bahaya dan dampak dari pernikahan dini. Guna memperoleh gambaran yang lebih rinci menurut teori Charles O. Jones (1996) aktivitas utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan adalah pengorganisasian, interpretasi dan penerapan, berikut ini pembahasannya:

Pengorganisasian

The Jones (1996) mengungkapkan tahapan organisasi dalam proses implementasi berupa tahapan penentuan dan pembentukan struktur organisasi, sumber daya, dan metode agar program atau kebijakan dapat berjalan sesuai dengan standar dan pedoman dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan.

Pada dimensi pengorganisasian memang sudah sesuai namun belum optimal dalam pelaksanaan, hal tersebut dikarenakan aktor pelaksana lainnya belum mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung belum terlibat langsung dalam pelaksanaan program, BKKBN dan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga belum terlibat dikarenakan fokus atau konsentrasi dari tujuan pelaksanaan program dilaksanakan berdasarkan tujuan dari instansi/lembaga pemerintah tersebut. Oleh

karena itu, selain sektor pemerintah diperlukan sumberdaya jaringan yang berasal dari masyarakat atau remaja yang dapat melanjutkan program tersebut. Metode penyampaian materi yang kurang menarik juga menjadi catatan khusus dalam pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja ini. Penyampaian metode yang kurang asik dan membosankan perlu dibenahi kembali. Seharusnya program kesehatan reproduksi remaja ini dapat dilaksanakan secara optimal jika semua departemen atau lembaga dapat berkolaborasi dengan baik dalam melaksanakan program kesehatan reproduksi remaja sehingga hal seperti penyampaian metode yang dinilai membosankan dapat teratasi dengan terlibatnya semua sektor instansi/lembaga dapat mengoptimalkan program tersebut.

Interpretasi

Interpretasi merupakan kegiatan atau upaya penjelasan kepada pelaksana dan kelompok sasaran dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar dapat dimengerti maksud kebijakan tersebut dan tata cara pelaksanaan serta aturan dalam kebijakan (Nurkholilah, 2021). Jones mendefinisikan kegiatan interpretasi sebagai kegiatan untuk menafsirkan suatu program untuk menjadi rencana dan pengarahan yang dapat diterima dan dilakukan. Kegiatan interpretasi juga dimaksudkan agar para pihak yang bertanggung jawab dalam proses implementasi kebijakan ini dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku dan harus dilihat pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Suryana, 2009).

Interpretasi dalam program ini adalah proses penjelasan kepada masyarakat mengenai standar-standar dalam pelaksanaan program ini, interpretasinya sudah dilaksanakan dikatakan belum berjalan dengan cukup optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya perencanaan yang belum dapat dilaksanakan dengan optimal dalam mengambil dan menentukan program yang akan dijalankan dalam proses kesehatan reproduksi remaja pada sekolah menengah atas di Provinsi Lampung kedepannya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan Kebudayaan Provinsi Lampung menentukan sekolah sasaran tanpa berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Sehingga peneliti melihat bahwa pemahaman terkait tujuan dan sasaran program tersebut terdapat kesalah pahaman antara kedua belah pihak tersebut. Oleh karena itu diperlukan kolaborasi dan kerjasama serta pemahaman apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari program tersebut,perlu adanya keselarasan serta satu pandangan yang sama antar aktor pelaksana. Jika hal tersebut berjalan dengan lancar maka program kesehatan reproduksi remaja dapat dilaksanakan dengan optimal.

Penerapan

Penerapan atau aplikasi merupakan kegiatan serta upaya pelaksanaan atau merealisasikan suatu kebijakan yang sesuai dengan rencana, pedoman, standar, dan tujuan yang diinginkan (Nurkholilah, 2021). Jones (1996) mendefinisikan kegiatan penerapan sebagai ketentuan rutin dari pelayanan atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program yang akan dilakukan dan juga tidak membatasi partisipasi segelintir orang yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dan juga menjelaskan bahwa kegiatan penerapan berisi tentang peraturan atau kebijakan tentang petunjuk pelaksana dan teknis sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat dan menjalankan hal tersebut maka harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Pada bagian penerapan telah berhasil terlaksana dengan baik. Hal itu dilihat dari prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan yang berjalan sesuai dengan perencanaan. Pada bagian adanya prosedur kerja yang jelas dan program kerja sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Term of

Reference Kesehatan Reproduksi Remaja milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung. Dalam waktu pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan yaitu 4-6 sekolah di Kabupaten yang berbeda pada setiap tahunnya. Namun, yang menjadi catatan adalah kurangnya pemahaman siswa terkait materi yang disampaikan belum dapat diukur secara pasti dan keberhasilan program belum dapat dikatakan berhasil dikarenakan program ini belum selesai dilaksanakan pada seluruh Kabupaten/Kota diProvinsi Lampung.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kesehatan Reproduksi Remaja Pada Sekolah Menengah Atas di Provinsi Lampung

Pada pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, terdapat beberapa faktor pendukung yang krusial untuk memastikan keberhasilannya. Berikut merupakan faktor pendukung program kesehatan reproduksi remaja: (1) Peran guru, peran guru di sekolah sangat vital dalam mendukung program kesehatan reproduksi remaja di Provinsi Lampung. Pertama, komitmen guru terhadap pemahaman mendalam tentang isu kesehatan reproduksi remaja menjadi faktor kunci. Guru yang memahami secara menyeluruh mengenai informasi kesehatan reproduksi remaja dapat memberikan edukasi yang akurat dan relevan kepada siswa. (2) Antuasisme siswa, faktor pendukung utama adalah penyelenggaraan program yang dirancang secara interaktif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Metode pembelajaran melalui diskusi terbuka dan simulasi situasional serta pemberian reward, telah berhasil memancing minat siswa. (3) Sarana dan Prasarana, lingkungan belajar yang baik dan mendukung, termasuk ketersediaan toilet yang bersih dan aman, dapat memberikan fasilitas yang memungkinkan para remaja untuk mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi dengan nyaman. Selain itu, ruang konseling yang terjangkau dan bersifat inklusif dapat menjadi tempat bagi siswa untuk mendiskusikan isu-isu kesehatan reproduksi secara terbuka dan mendapatkan panduan yang akurat.

Pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja di sekolah memiliki sejumlah faktor penghambat yang dapat memengaruhi pelaksanaan programnya, berikut merupakan faktor penghambat dari pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja, yaitu: (1) Program belum berkelanjutan, program yang hanya dilaksanakan 1 kali tidak cukup untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kesehatan reproduksi remaja. Siswa/i perlu mendapatkan informasi dan edukasi secara berkala agar pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi remaja dapat meningkat. (2) Penyampaian materi yang monoton, ketika penyajian materi dilakukan secara rutin dan kurang inovatif, siswa mungkin kehilangan minat dan fokus, mengurangi efektivitas pembelajaran. Keterlibatan siswa dapat menurun karena kurangnya variasi dalam metode pengajaran, seperti penggunaan media pembelajaran yang terbatas atau kurangnya interaksi langsung.(3) Kurangnya sumber daya pelaksana, program ini memiliki sifat yang haus akan dukungan berkelanjutan untuk mencapai dampak yang signifikan. Ketidakberlanjutan dukungan dari perangkat daerah lain, baik dalam hal anggaran maupun peran aktif, dapat membatasi cakupan dan efektivitas program. Oleh karena itu, penting untuk membangun kerjasama yang erat dengan perangkat daerah terkait guna memastikan sumber daya yang memadai dan berkelanjutan dalam mendukung program kesehatan reproduksi remaja di Provinsi Lampung.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan, peneliti menarik kesimpulan akhir dalam implementasi program kesehatan reproduksi remaja sebagai berikut:

1) Hasil penelitian implementasi program kesehatan reproduksi remaja pada sekolah menegah atas di Provinsi Lampung secara keseluruhan sudah diterapkan dan mengalami penurunan kasus perkawinan anak. Namun program kesehatan reproduksi remaja masih terdapat kelemahan yaitu pada dimensi pengorganisasian masih kekurangan pada sumberdaya pelaksana serta metode penyampaian informasi. Pada dimensi interpretasi, aktor pelaksana telah memahami program kesehatan reproduksi remaja. Pada dimensi penerapan, program kesehatan reproduksi remaja diperlukan kegiatan berkelanjutan agar informasi terkait kesehatan reproduksi remaja khususnya perkawinan anak dapat tersampaikan dengan baik
2) Faktor Pendukung pada pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja ini, yaitu komitmen guru terhadap pemahaman mendalam tentang isu kesehatan reproduksi, antusiasme siswa yang mencuat tinggi dalam mengikuti program kesehatan reproduksi remaja di sekolah, serta sarana dan Prasarana dalam menjalankan program kesehatan reproduksi remaja. Sedangkan faktor penghambat pada pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja di Provinsi Lampung ini, yaitu program belum berkelanjutan sehingga mengakibatkan terhadap pemahaman siswa/i yang menjadi target sasaran, metode penyampaian materi kesehatan reproduksi yang monoton, kurangnya sumberdaya pelaksana, terutama dalam hal kurangnya dukungan dari perangkat daerah lain, program ini memiliki sifat yang haus akan dukungan berkelanjutan untuk mencapai dampak yang signifikan.

Saran

Setelah mempertimbangkan apa yang penulis jelaskan, penulis dapat mengatakan, berikut beberapa saran:

1) Pendidikan dan pelatihan bagi guru bimbingan konseling terkait kesehatan reproduksi, dengan guru bimbingan konseling yang terlatih dan paham diharapkan dapat memberikan edukasi mendalam kepada siswa/i di sekolahnya.
2) Perlunya kerja sama yang serius antara beberapa perangkat daerah dan lembaga non pemerintah untuk menjalankan program kesehatan reproduksi remaja. Program ini tidak dapat dijalankan oleh satu perangkat daerah akan tetapi membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak seperti Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, PKBI serta BKKBN.
3) Metode penyampaian materi yang inovatif dan kreatif, sehingga siswa/i tidak bosan dalam mendengarkan penyampaian materi dapat diselipkan games yang bersifat untuk mengukur tingkat pemahaman siswa/i terkait kesehatan reproduksi.
4) Dibentuknya organisasi ekstrakulikuler di sekolah Pusat Informasi dan Konseling Remaja di bawah naungan guru bimbingan konseling yang mengawasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Presenting Hayat. (2018). *Buku Kebijakan Publik*. Malang: Intrans Publishing.

Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada.

Setiyaningrum E. (2015). *Pelayanan Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi*. Jakarta: Cv Trans Info Media.

Widodo, Joko. (2001). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi*. Malang: Bayumedia Publishing.

Jurnal:

Nurkholilah, Desprita and Fatriani, Riri Maria and Karim, Navarin(2021). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dalam Upaya PemenuhanKebutuhan Fisiologi Masyarakat di Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi. *S1 thesis*, Universitas Jambi.

Ratmiko, A., & Winarsih, S. (2005). Implementasi Program Pelayanan Publik Bidang Pertanahan di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 1(2), 1-16.

Setianti, Di. Dkk. (2019). Media Informasi Kesehatan Reproduksi Bagi Remaja Disabilitas Tunagrahita di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7 (2).

Teti, Sriharyati. (2012). Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur di Desa Blandongan. *S1 Thesis*. Fakultas Ilmu Sosial.